

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pemerintah kabupaten/kota harus mampu mengelola pendapatan yang mereka peroleh untuk dialokasikan kepada belanja yang sifatnya produktif. Belanja yang produktif akan memberikan efek yang baik yaitu dapat meningkatkan jumlah penghasilan yang diterima sehingga pemerintah kabupaten/kota dapat membiayai kebutuhan kabupaten/kota mereka. Pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dijelaskan dalam PP Nomor 12 (2019) yakni pemerintah daerah dalam mengurus daerahnya masing masing dengan cakupan yang lebih luas serta meminimalisir bantuan atau campur tangan dari pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah kabupaten/kota harus mengelola keuangan mereka secara mandiri. Pelaksanaan desentralisasi fiskal memunculkan masalah baru dikarenakan beberapa kabupaten/kota masih belum memiliki persiapan yang cukup dalam menghadapinya (Huda & Sumiati, 2019). Daerah yang berhasil dalam melaksanakan desentralisasi fiskal ini salah satunya ditandai dengan besarnya Pendapatan Asli Daerah yang mereka hasilkan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Apabila jumlah Pendapatan Asli Daerah lebih besar dibandingkan jumlah pengeluaran yang dibutuhkan maka pemerintah daerah tersebut dapat membiayai segala kebutuhannya tanpa harus

mendapat bantuan dana perimbangan dari pemerintah pusat sehingga fokus mereka selanjutnya adalah untuk memaksimalkan pelayanan kepada publik (Suryana, 2018).

Jika pemerintah belum mampu menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh daerahnya maka dampaknya adalah pendapatan asli daerah yang diterima oleh mereka menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, mereka membutuhkan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dana perimbangan yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah (Warasati, Palampanga dan Iqbal, 2018). Dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah tersebut salah satunya adalah dana alokasi umum. Akan tetapi hal demikian menandakan otonomi beberapa daerah tersebut masih lemah karena masih bergantung dengan pemerintah pusat. Tujuan dari Dana Alokasi Umum ini adalah menutup kesenjangan fiskal yang terjadi pada beberapa daerah-daerah tertentu sehingga jumlah dana alokasi umum yang mereka terima tidak sama akan tetapi jumlahnya sesuai dengan yang mereka butuhkan (Rudiansah, 2017).

Setelah pemerintah daerah melaksanakan segala program kerja yang telah mereka rumuskan, terdapat selisih antara jumlah yang dianggarkan dan jumlah yang direalisasikan. Jika jumlah yang dianggarkan jauh lebih besar dari pada jumlah yang direalisasikan maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Sisa lebih pembiayaan anggaran dapat terjadi apabila terjadi efisiensi dalam pelaksanaan agenda atau program yang diadakan oleh

pemerintah daerah. Hal demikian menyebabkan surplus pada APBD sehingga jumlah penerimaan menjadi jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan jumlah pengeluaran (Apriyanto, 2016).

Belanja modal merupakan salah satu belanja produktif yang dapat meningkatkan penghasilan pemerintah daerah. Belanja modal adalah belanja yang dilakukan dengan tujuan untuk menambah jumlah aset tetap yang memiliki masa ekonomis selama lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Pertama, belanja modal yang manfaatnya diterima secara langsung oleh masyarakat. Kedua, belanja modal yang manfaatnya tidak langsung diterima oleh publik tetapi dirasakan langsung manfaatnya oleh pemerintah. Contoh dari belanja modal yang diterima langsung manfaatnya oleh pemerintah seperti pembangunan gedung dewan atau fasilitas lainnya yang bertujuan untuk menunjang aktivitas pemerintahan (Apriyanto, 2016).

Pemerintah daerah dituntut untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah mereka dalam jumlah yang besar supaya daerah tersebut dapat membiayai kebutuhannya secara mandiri. Salah satu cara yang dapat pemerintah daerah lakukan yaitu dengan mengalokasikan sebagian pendapatan yang mereka terima kepada belanja yang bersifat produktif dan menambah nilai aset dalam jangka panjang yaitu Belanja Modal. Pemerintah daerah harus mengalokasikan Belanja Modal dalam belanja mereka dengan porsi yang lebih besar dibandingkan dengan belanja yang lainnya. Karena dengan mengalokasikan Belanja Modal dengan porsi yang besar akan memberikan

manfaat kepada pemerintah daerah dan publik.

Menurut Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pada tahun 2017 pemerintah daerah belum mengelola keuangan mereka dengan efektif dan efisien. Sedangkan, dana yang diturunkan oleh pemerintah pusat selalu meningkat dari tahun ke tahun. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yaitu Boediarso Teguh Widodo menyebutkan transfer ke daerah tahun 2017 mencapai Rp 766 triliun atau mengalami peningkatan yang tajam dibandingkan pada saat dimulainya desentralisasi fiskal yaitu Rp 81 triliun. Kementerian Keuangan mencatat beberapa sebab yang mempengaruhi pengelolaan keuangan yang tidak efisien. Salah satunya yaitu belanja pegawai di pemerintah daerah yang jauh lebih besar dari porsi belanja modal. Total belanja pegawai sebesar 36,8 persen sedangkan belanja modal hanya sebesar 20 persen (Florentin, 2017).

Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk mengelola dana publik yang diamanahkan kepada mereka untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan publik. Kebutuhan-kebutuhan tersebut misalnya seperti, pembangunan gedung, pembangunan irigasi, pembangunan jalan umum, dan pembangunan yang lainnya. Tujuan dari semua pembangunan tersebut adalah memberikan manfaat yang banyak kepada publik sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas mereka dengan mudah dan nyaman. Apabila masyarakat daerah tersebut sudah merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam aktivitas mereka, mereka akan mendukung secara penuh pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal demikian itu sebagai bentuk timbal balik publik kepada

pemerintah daerah dikarenakan pemerintah daerah berhasil memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, timbal balik yang dapat dirasakan oleh pemerintah daerah yaitu pendapatan daerah yang diterima juga meningkat dikarenakan pembangunan-pembangunan yang mereka laksanakan.

Pemerintah daerah tidak salah dalam mengalokasikan pendapatan yang mereka peroleh selain kepada belanja modal. Akan tetapi, pemerintah daerah perlu memikirkan akibat jangka panjang dari belanja yang mereka melakukan sehingga mereka mengetahui belanja manakah yang harus menjadi prioritas dan mana yang tidak. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengelola pendapatan daerah mereka menjadi lebih efisien.

Pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan secara efisien akan meningkatkan kemampuan daerah tersebut dalam hal kemandirian fiskal mereka. Kemandirian fiskal ini diukur dari seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangan mereka.

Apabila daerah tersebut telah mandiri secara fiskal maka mereka tidak akan selalu bergantung kepada Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah pusat tidak perlu lagi turun tangan untuk membantu pemerintah kabupaten/kota dalam hal pendanaan sehingga pemerintah pusat dapat fokus untuk membantu daerah lain yang masih belum mandiri secara fiskal. Apabila seluruh daerah mampu mandiri secara fiskal maka dana alokasi umum yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah akan jauh berkurang sehingga dana alokasi umum tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lainnya. Dengan adanya beberapa daerah

yang mampu mandiri secara fiskal dapat memotivasi daerah-daerah lain di sekitarnya untuk mengelola keuangan mereka dengan efisien.

Melihat pentingnya belanja modal ini untuk diteliti, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal”. Peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja modal. Peneliti juga ingin mengetahui apakah tiga sumber pendapatan pemerintah daerah tersebut dapat dikelola oleh mereka dengan efisien atau belum.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Setelah mengetahui batasan mana saja akan diteliti, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal?
3. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui pengaruh :

1. Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat.
2. Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal yang dialokasikan oleh

pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat untuk beberapa kalangan di antaranya sebagai berikut :

- a. Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kondisi keuangan di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat

- b. Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Memberikan informasi kepada pemerintah kabupaten/kota provinsi Jawa Barat sebagai dasar untuk melakukan evaluasi atas kinerja keuangan mereka untuk periode berikutnya